

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

(TRIWULAN IV)

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (BP3KP) JAWA II TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Laporan Kinerja Triwulan ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja sebagai salah satu wujud komitmen dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden khususnya dalam bidang perumahan dan Kawasan permukiman yang layak. Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat program dan kegiatan guna meningkatkan kualitas Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian PKP.

Laporan Kinerja Triwulan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil guna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya.

Melalui Dokumen Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target Unit Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 sehingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon kiranya diberikan masukan guna penyempurnaannya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jawa II



Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T.

NIP. 19710920 199803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
 BAB I PENDAHULUAN.....	 5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tugas dan Fungsi.....	7
1.3 Sasaran Strategis.....	8
 BAB II CAPAIAN KINERJA BULANAN	 14
2.1 Target Penetapan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II.....	14
2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II.....	20
2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	21
 BAB III KESIMPULAN.....	 22



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cakupan Laporan Kepemilikan Rumah Dan Backlog Perumahan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Awal Balai P3KP Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Akhir Balai P3KP Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	15
Tabel 2.3	Target Penetapan Kinerja Keuangan Kegiatan Triwulan IV Balai P2P Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat	17
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Program Triwulan IV Balai P3KP Jawa II	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kementerian PKP, merupakan kementerian yang dibentuk pada tahun 2024 dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Kementerian ini memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan serta suburusan kawasan permukiman, yang secara administratif merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pembentukan dan kedudukan Kementerian PKP secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2024. Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara, khususnya dalam upaya mewujudkan penyediaan hunian yang layak serta pengembangan Kawasan permukiman yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN), khususnya PN 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program prioritas dalam mendukung PN tersebut adalah program prioritas ke-13: menjamin hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Peran strategis Kementerian PKP dalam bidang ini diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Peran strategis tersebut diwujudkan melalui pembangunan guna menjawab mandat pembangunan tersebut, Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di



kawasan perkotaan, 1 (satu) juta rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta rumah di wilayah pesisir. Untuk mendukung pencapaian sasaran dimaksud secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dibutuhkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan, belum tersedianya NSPK yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, keterbatasan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterbatasan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, terhambatnya penyelesaian serah terima aset, serta fragmentasi data dan ketergantungan vendor dalam pengembangan sistem informasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan proses kerja, menurunnya akuntabilitas, dan menghambat tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, instansi pemerintah termasuk di dalamnya unit organisasi diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perjanjian Kinerja, yang menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target dalam Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Aksi Kinerja, yang memuat target kinerja triwulanan sebagai turunan dari target tahunan. Rencana Aksi Kinerja ini selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengukuran kinerja, sebagai bagian dari siklus penyelenggaraan SAKIP secara menyeluruh.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja merupakan instrumen strategis yang berperan penting dalam memastikan setiap unit kerja berkontribusi secara terukur terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas tata



kelola dan sistem pengawasan intern. Lebih dari sekadar pemetaan capaian kinerja secara periodik, Rencana Aksi Kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, dokumen ini menjadi pedoman manajerial bagi unit kerja dalam menguraikan sasaran strategis ke dalam aktivitas operasional yang terukur, selaras, dan akuntabel, sehingga mendukung penguatan tata kelola serta efektivitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP mempunyai tugas Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;



- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Sasaran Strategis

Kondisi perumahan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Basis Data Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, berikut ikhtisar kondisi perumahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 berdasarkan data terbaru yang tersedia dari berbagai sumber statistik dan laporan terkait Basis Data Perumahan serta kondisi perumahan di provinsi Jawa Barat:

a. Backlog Perumahan (Belum Memiliki Rumah)

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, sekitar 2,1 juta rumah tangga di Jawa Barat belum memiliki tempat tinggal sendiri / hunian tetap. Ini merupakan bagian dari backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

b. Backlog Perumahan Provinsi

Angka backlog perumahan provinsi Jawa Barat adalah sekitar 36,10% dari jumlah keluarga, dengan komponen backlog RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sekitar 21,05% dan backlog kepemilikan rumah sekitar 15,05%. Ini menunjukkan bahwa



lebih dari sepertiga keluarga di Jabar masih menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak.

c. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan perbaikan sekitar 1.270 unit RTLH pada tahun 2025 di 15 kabupaten/kota. Perbaikan ini mencakup struktur bangunan, dinding, atap, lantai, kamar mandi, hingga sanitasi dasar seperti septic tank.

d. Penyaluran Rumah Subsidi & Akses Pembiayaan

Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran rumah bersubsidi FLPP tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, dengan puluhan ribu unit rumah subsidi telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan tingginya permintaan dan kebutuhan terhadap hunian yang terjangkau.

e. Data Statistik Perumahan

Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2024 (diterbitkan Agustus 2025) menyajikan data komprehensif tentang keadaan perumahan di provinsi ini berbasis Susenas, yang menjadi acuan untuk pemetaan kondisi perumahan dan perencanaan program ke depan.

Selain itu, publikasi Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025 oleh BPS Jabar juga menyediakan data terkait aspek demografi dan perumahan yang dapat digunakan sebagai basis analisis perumahan di wilayah ini.

f. Tantangan Utama

Permintaan hunian tinggi: Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di wilayah metropolitan seperti Bogor-Depok-Bekasi serta kawasan Bandung dan sekitarnya memperkuat permintaan rumah.

Backlog dan backlog RTLH: Meskipun ada penurunan backlog nasional, Jawa Barat tetap mengalami angka backlog yang signifikan baik dalam kepemilikan rumah maupun RTLH.



Perluasan jaringan pembiayaan: Pemerintah memfokuskan pada pemberian pembiayaan bersubsidi (FLPP, KUR perumahan), namun masih perlu memperluas akses dan menjangkau lebih banyak rumah tangga yang membutuhkan.

Tabel 1. 1 Cakupan Laporan Kepemilikan Rumah Dan Backlog Perumahan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
1	KAB. BOGOR	280.059	494.937	774.996
2	KAB. BANDUNG	256.647	296.946	553.593
3	KAB. SUKABUMI	122.461	392.382	514.843
4	KAB. GARUT	143.032	347.415	490.447
5	KAB. CIANJUR	131.830	344.490	476.320
6	KAB. TASIKMALAYA	84.578	255.047	339.625
7	KAB. BANDUNG BARAT	84.909	185.139	270.048
8	KOTA BANDUNG	168.365	97.676	266.041
9	KAB. CIREBON	187.148	59.782	246.930
10	KAB. BEKASI	78.085	138.465	216.550
11	KAB. KARAWANG	96.028	114.725	210.753
12	KAB. CIAMIS	61.699	137.596	199.295
13	KAB. INDRAMAYU	116.392	64.399	180.791
14	KAB. SUMEDANG	67.275	102.641	169.916
15	KAB. SUBANG	88.174	74.958	163.132
16	KAB. MAJALENGKA	83.593	79.301	162.894
17	KAB. KUNINGAN	78.752	69.051	147.803
18	KOTA BEKASI	86.310	50.158	136.468
19	KAB. PURWAKARTA	52.204	73.830	126.034
20	KOTA BOGOR	73.514	52.241	125.755
21	KOTA DEPOK	73.001	43.520	116.521
22	KOTA TASIKMALAYA	58.844	55.117	113.961
23	KOTA CIMAHI	43.608	20.644	64.252
24	KAB. PANGANDARAN	16.659	42.074	58.733
25	KOTA SUKABUMI	25.560	23.503	49.063
26	KOTA CIREBON	25.503	7.797	33.300
27	KOTA BANJAR	12.480	7.964	20.444
	Total	2.596.710	3.631.798	6.228.508

*(Sumber: Dashboard pkp.go.id Tahun 2025).

Sementara itu kondisi rumah tidak layak huni pada akhir tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.631.789 unit atau sekitar 28,04 % dari jumlah rumah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 12.951.170 unit dengan jumlah penduduk



sebesar 48.738.808 jiwa (Sumber: Dashboard pkp.go.id Tahun 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memiliki mandat untuk menyelenggarakan program perumahan nasional yang terintegrasi, inklusif, dan menjamin akses hunian layak bagi seluruh masyarakat sesuai peraturan perundangan. Sasaran umumnya meliputi:

- Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Pengurangan backlog rumah tidak layak huni secara bertahap.
- Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan akses infrastruktur dasar.

Penyelenggaraan perumahan & permukiman yang berkelanjutan sesuai RPJMN 2025–2029.

Data BPS menunjukkan di Provinsi Jawa Barat prosentase tingkat kepemilikan rumah adalah 77,89% milik sendiri, 11,11% sewa, 10,39% bebas sewa/menumpang dan sisanya tinggal di rumah dinas dan lainnya. Kota Bandung merupakan wilayah dengan kepemilikan rumah tinggal sendiri yang terendah 53,80% diikuti oleh Kota Cimahi 56,63% ini menunjukkan baik suply dan demand mengalami kekurangan, harga rumah sudah tinggi akibat harga tanah yang melambung, lahan sudah sangat terbatas sehingga perlu melaksanakan pembangunan Rusun sebagai solusi perumahan dan permukiman. Pembangunan rumah tapak masih bisa dilaksanakan di wilayah Kabupaten tetapi harus di perhatikan aspek lingkungan dan pergerakan penduduknya.

Salah satu aspek rumah yang layak huni adalah aspek kesehatan. Berdasarkan Permen Kimpraswil, luas ruang minimum per orang adalah 9 m², sedangkan berdasarkan BPS adalah 8 m². Dengan mengacu pada standar dari BPS tersebut, persentase kepala keluarga yang menempati rumah layak huni adalah sebanyak 88,95%. Adapun persentase kecukupan ruang paling tinggi adalah di Kota Banjar dengan nilai 99,0% dan yang paling rendah adalah Kota Bandung sebesar 71,54%. Dengan melihat karakteristik tersebut, maka program rumah susun dan rumah swadaya harus bisa difokuskan pada wilayah yang tepat.

Penggunaan bahan bangunan yang berbaya harus dihilangkan agar dapat menjadi bangunan layak huni. Salah satu bahan bangunan yang berbahaya adalah



penggunaan material berbahan asbes, baik untuk dinding maupun atap. Di wilayah kerja BP3KP Jawa II, masih terdapat 13,63% rumah yang menggunakan asbes sebagai atap, yaitu paling banyak di Kota Bogor (48,84%), Kota Bekasi (37,25%), dan Kota Bogor (29,58%). Dengan demikian, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian dengan melibatkan program – program dari Direktorat Rumah Swadaya.

Data BPS juga mencatat masih besarnya penggunaan dinding anyaman di wilayah tertentu pada rumah-rumah di wilayah kerja BP3KP Jawa II. Penggunaan dinding anyaman tidak serta merta menjadikan rumah tidak layak huni tetapi beberapa dinding anyaman seperti dinding anyaman bambu dan rumbia gampang mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, terdapat 7,74% rumah tangga yang menggunakan dinding rumah dari anyaman. Di Kabupaten Cianjur, sebanyak 24,27% rumah masih menggunakan anyaman, sedangkan persentase beberapa kabupaten lainnya adalah sebanyak 23,43% di Kabupaten Garut dan 21,02% di Kabupaten Tasikmalaya. Perbaikan dinding menjadi prioritas dan penggunaan bahan yang aman, sehat dan awet perlu dipilih dalam implemtasi bantuan pemerintah, skema bantuan bisa menggunakan program dari Direktorat Rumah Swadaya

Aspek lain dari rumah layak huni adalah aspek sanitasi. Berdasarkan data BPS baru 82,35% rumah tangga yang mempunyai fasilitas mandi cuci kakus (MCK) sendiri, 73,07% yang mempunyai septik tank dan IPAL malah untuk beberapa daerah jumlahnya lebih kecil seperti kepemilikan MCK di Kabupaten Cianjur sebesar 70,04%, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 70,28%, dan Kabupaten Garut sebesar 73,30% demikian juga dengan penggunaan septik tank dan IPAL di beberapa daerah sangat kurang seperti di Kabupaten Sukabumi sebesar 40,07%, Kota Sukabumi sebesar 41,37% dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 48,17% hal ini perlu program yang sesuai untuk meningkatkan perumahan warga menjadi layak huni.

Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di wilayah yang padat penduduk dengan lahan yang sangat terbatas seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, prioritas pembangunan lebih pada bangunan bertingkat seperti Rusun. Di sisi lain, untuk kawasan penyangga kota-kota besar seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupagten Bekasi program pembangunan dapat diarahkan ke program PSU karena akan banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang untuk melayani kebutuhan



perumahan di wilayah tersebut. Wilayah dengan kualitas bangunan maupun penunjangnya yang masih kurang didorongan untuk bisa melakukan perbaikan dengan program rumah swadaya. Adapun program rumah khusus diharapkan dapat berperan pada daerah-daerah dengan kepadatan rendah dan kepemilikan bangunan seperti Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi.



BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II (BP3KP Jawa II) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

2.1 Target Penetapan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Pada Tahun 2025 bulan Agustus, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, BP3KP Jawa II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat memiliki amanat menjalankan Program Perumahan dengan pagu anggaran masing masing Direktorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Balai P3KP Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Direktorat Jenderal	BP3KP Jawa II	Satker PKP Provinsi Jawa Barat
1	Sekretariat Jenderal	Rp1.712.579.000	Rp350.339.000
2	Direktorat Jenderal Perkotaan	Rp1.282.261.000	Rp52.349.137.000
3	Direktorat Jenderal Perdesaan	Rp112.334.000	Rp105.372.354.000
4	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp458.668.000	Rp21.219.682.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rp303.465.000	-



Terdapat revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Desember 2025, hal ini merupakan revisi Perjanjian Kinerja terakhir. Terdapat penambahan nilai pagu, pengurangan nilai pagu, dan nilai pagu yang tetap pada masing masing Direktorat Jenderal, sehingga nilai anggaran yang di miliki oleh BP3KP Jawa II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat sebesar :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Akhir Balai P3KP Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Direktorat Jenderal	BP3KP Jawa II	Satker PKP Provinsi Jawa Barat
1	Sekretariat Jenderal	Rp1.810.980.000	Rp1.050.227.000
2	Direktorat Jenderal Perkotaan	Rp1.282.261.000	Rp43.617.860.000
3	Direktorat Jenderal Perdesaan	Rp294.766.000	Rp105.798.390.000
4	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp458.668.000	Rp16.972.448.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rp303.465.000	-

Pada pagu Sekretariat Jenderal memiliki perubahan dari semula Rp1.712.579.000, naik menjadi Rp1.810.980.000 untuk BP3KP Jawa II dan semula Rp350.339.000, naik menjadi Rp1.050.227.000 untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat.

Pada pagu Direktorat Jenderal Perkotaan tidak terjadi perubahan sehingga nilai pagu tetap sebesar Rp1.282.261.000 untuk BP3KP Jawa II dan semula Rp52.349.137.000, mengalami penurunan pagu menjadi Rp43.617.860.000 untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat.

Pada pagu Direktorat Jenderal Perdesaan memiliki perubahan dari semula Rp112.334.000, turun menjadi Rp294.766.000 untuk BP3KP Jawa II dan semula Rp105.372.354.000, naik menjadi Rp105.798.390.000 untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat.



Pada pagu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tidak memiliki perubahan, sehingga nilai pagu tetap sebesar Rp458.668.000 untuk BP3KP Jawa II dan semula Rp21.219.682.000, mengalami penurunan pagu menjadi Rp16.972.448.000 untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat.

Pada pagu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tidak memiliki perubahan, sehingga nilai pagu tetap sebesar Rp303.465.000.



Pada Triwulan IV ini (bulan Oktober, November, Desember 2025), kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II yaitu berupa Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Sosialisasi, Pelatihan, dan Penerapan Manajemen Risiko, menindaklanjuti laporan pada aplikasi BENAR-PKP, Klinik PKP dan SPAN Lapor, Pendampingan Penyusunan RP3KP, Pendampingan DAK-T dan PPKT, Pelaksanaan Program peningkatan kualitas Permukiman Kumuh, Pelaksanaan Program bantuan BSPS, Pelaksanaan persiapan pembangunan Rumah Susun hunian ASN Mahkamah Agung di Kota Bandung dan Kota Bekasi, dan Pelaksanaan OJT bagi CPNS baru.

Tabel 2.3 Target Penetapan Kinerja Keuangan Kegiatan Triwulan IV Balai P2P Jawa II dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	TW1	TW2	TW3	TW4			
SEKRETARIAT JENDERAL				Balai	Rp 1,810,980,000			21.99%	78.01%			
				Satker	Rp 1,050,227,000			8.35%	91.65%			
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen	1	Tingkat dukungan manajemen	1 layanan	Rp 1,810,980,000							
				1 layanan	Rp 1,050,227,000							
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN				Balai	Rp 1,282,261,000			10.23%	89.77%			
				Satker	Rp 43,617,860,000			12.94%	87.06%			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	Rp 394,645,000							
				1 Laporan	Rp 312,911,000							
		2	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Rp 606,223,000							
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	Rp 312,470,000							



		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1279 unit	Rp 27,462,074,000					
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan	Rp 262,235,000					
		2	Jumlah rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 unit	Rp 9,883,991,000					
		3	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	21 unit	Rp 5,665,572,000					
DIREKTORAT JENDERAL PERDESAAN				Balai	Rp 294,766,000			10.64%	89.36%	
				Satker	Rp 105,798,390,000			0.54%	99.46%	
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Dan Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan Pedesaan.	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Pedesaan	1 Kegiatan	Rp 112,334,000					
		2	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Pedesaan	1 Laporan	Rp 73,081,000					
		3	Jumlah Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Pedesaan	1 Laporan	Rp 182,432,000					
				1 Laporan	Rp 246,036,000					
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan Di Wilayah Pedesaan.	1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Pedesaan	4701 unit	Rp 100,479,273,000					
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Pedesaan.	1	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan	1 unit	Rp 5,000,000,000					
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				Balai	Rp 458,668,000			12.96%	87.04%	
				Satker	Rp 16,972,448,000			3.42%	96.58%	
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	Rp 78,368,000					
		2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Kumuh.	1 Laporan	Rp 330,300,000					
				1 Laporan	Rp 78,292,000					



		3	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 50,000,000				
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Rumah Swadaya Di Kawasan Permukiman	385 unit	Rp 8,536,310,000				
3	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni.	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan Dan Kawasan Permukiman	444 unit	Rp 2,483,832,000				
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	29,03 hektar	Rp 5,874,014,000				
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO					Balai	Rp 303,465,000		7.42%	92.58%
					Satker				
1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efektif Dan Akuntabel	1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi Dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 129,233,000				
2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko Dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 174,232,000				

2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II di Triwulan IV Tahun 2025 pada capaian progress fisik di triwulan IV ini secara keseluruhan sudah mencapai 100%, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Triwulan IV Balai P3KP Jawa II

PROGRES FISIK TA 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II																							
No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan									
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok
1	Penerapan Manajemen Risiko	JAWA BARAT	1 Rekomendasi	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	176.932.000	176.932.000	172.075.307	02-01-2025	31-12-2025	97,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	6,97	13,46	27,57
2	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Jawa II	JAWA BARAT	1 Rekomendasi	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	126.533.000	126.533.000	125.072.984	02-01-2025	31-12-2025	98,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	26,95
TOTAL							303.465.000	303.465.000	297.148.291			97,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	4,06	12,10	27,31

PROGRES FISIK TA 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II																							
No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan									
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok

PROGRES FISIK TA 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan											
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh BP3KP Jawa II	JAWA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	244.461.000	244.461.000	228.226.405	02-01-2025	31-12-2025	93,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	15,88	34,53	46,75	100,00
2	Pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai P3KP Jawa II	JAWA BARAT	1 Layanan	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	50.000.000	50.000.000	27.795.109	02-01-2025	31-12-2025	55,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	12,51	52,22	54,74	100,00
3	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	JAWA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	164.207.000	164.207.000	155.058.498	02-01-2025	31-12-2025	94,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	25,76	31,51	31,51	50,15	100,00
TOTAL							458.668.000	458.668.000	411.040.012			89,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	13,20	21,11	35,38	48,84	100,00

PROGRES FISIK TA 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan											
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	JAWA BARAT	1 Rekomendasi	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	394.645.000	394.645.000																	

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II (BP3KP Jawa II) pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV difokuskan pada penguatan fungsi fasilitasi, pendampingan, koordinasi, verifikasi teknis, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut telah mendukung tercapainya indikator kinerja program di seluruh Direktorat Jenderal yang menjadi lingkup tugas BP3KP Jawa II, baik pada aspek dukungan manajemen, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan teknis.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran hingga Triwulan IV menunjukkan progres yang sesuai dengan karakteristik pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan nonfisik dan fasilitasi teknis. Sebagian besar anggaran direncanakan terealisasi pada Triwulan IV seiring dengan selesainya tahapan persiapan, verifikasi, dan pendampingan teknis, terutama pada kegiatan bantuan pemerintah dan pembangunan fisik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BP3KP Jawa II pada Triwulan IV Tahun 2025 berada pada jalur yang tepat (on track) untuk mencapai target kinerja tahunan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman.

